

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Pemanggilan RUPS yang dilakukan Kuk Bong Yi terhadap Pemegang Saham terbesar jelaslah memiliki maksud dan tujuan tersembunyi yaitu:

- 1) Ada maksud agar Bali Bias Putih Korea Co.ltd. tidak datang dalam RUPSLB pertama dan kedua;
- 2) Agar quorum turun pada pemanggilan kedua;
- 3) Agar Kuk Bong Yi tetap menjadi direktur utama sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kemauannya.

Perbuatan Kuk Bong Yi ini selaku Direktur Utama jelaslah tidak mencerminkan Prinsip-Prinsip GCG. Dalam melakukan pengurusan Perseroan, Direksi harus melakukan pengurusan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT. Pengurusan yang dimaksud tentunya termasuk juga dalam hal menyelenggarakan RUPS. Jadi makna GCG dalam hal ini adalah bahwa Direksi dalam melakukan pemanggilan harus melakukan upaya sedemikian rupa sehingga seluruh pemegang saham bisa hadir.

B. Saran

Saran dari Penulis adalah bunyi Pasal 82 ayat (2) UUPT 2007 sebenarnya sudah baik hanya dapat disalahgunakan. Kata dan/atau memang akan menimbulkan permasalahan yang besar apabila hanya diartikan secara harafiah. Seharusnya bunyi pasal tersebut lebih diperjelas dan seharusnya ada aturan yang detail dan rinci sebagai bentuk kepastian hukum tentang masalah itikad baik direksi, dalam hal pendefinisian, metode penerapan dan sebagainya. Sebaiknya di dalam Pasal 82 ayat (2) tersebut kata dan/atau diganti menjadi dan saja. Majelis Hakim dalam memutus perkara juga sebaiknya menimbang dengan berbagai aspek dan menimbang dengan pasal-pasal lainnya yang mewajibkan Direksi bertindak berdasarkan prinsip-prinsip GCG, karena prinsip-prinsip GCG adalah *mandatory rule* dalam dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Achmad Daniri, *lead by GCG*, 2014, *Gagas Bisnis*, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2008, *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat.
- Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta
- Karen Cak Niederkohr dan John Ikeda, *Credit Union Governance*, White Paper, World Council of Credit Union Inc., 2005.
- Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, UAJY, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law. Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Khairandy & Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Salim H.S. 2004, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. II. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sonny Keraf, A, 1995, *Etika Dunia Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Walter Woon. 1998. *Company Law*. Longman Singapore Publisher Pte. Ltd.
- Yahya Harahap, S.H., 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta

JURNAL

- Hasnati, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Jurnal manajemen dan kewirausahaan, vol.8, no. 1, maret 2006: 1-9 *Good Corporate Governancedan Penerapannya di Indonesia* Thomas S. Kaihatu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 22-30 *implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan(Studi Pada Pt. Telkom Banyuwangi)* Ekky Dwi Ferlinda, Heru Ribawanto, Siswidiyanto

Jurnal *Pengertian Itikad Baik* oleh Fikram Faraid, hlm 4, Universitas Krisna Dwi Payana

KAMUS

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*. America: West, Thomson Group.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

SUMBER LAIN

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bali Bias Putih No.01/2008.
Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.75/Pdt.G/2011/PN.Amp.
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.156/Pdt./2012/PT.Dps.

WEBSITE

Dadang Sukandar,2013.*RUPS*. Diakses dari

www.legalakses.com,*RUPS*, tanggal 10 Agustus 2015.

Dona Doni,2015. *Prosedur Penyelenggaraan RUPS* . Diakses dari

www.academia.edu., tanggal 10 Agustus 2015.